



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 30 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Raih Prestasi Kinerja Tertinggi Nasional, Percepat Pembangunan Infrastruktur untuk Dorong Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih Penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi Nasional dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2025 dengan skor 3,000 dan status lima bintang. Penghargaan ini diberikan kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, Ulu pada penganjuran Hari Otonomi Daerah 2025 Tahun 2026 di Jakarta.

Capaian tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dan kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta pencapaian pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, lembaga mitra, dan masyarakat. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta pencapaian pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, lembaga mitra, dan masyarakat. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta pencapaian pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, lembaga mitra, dan masyarakat. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta pencapaian pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, lembaga mitra, dan masyarakat. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta pencapaian pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, lembaga mitra, dan masyarakat. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta pencapaian pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, lembaga mitra, dan masyarakat. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur.



PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

INSTRUKSI-DEK TERTINGGI DALAM PENYELANGSIAN PENGELOLAAN DAERAH

KABUPATEN TERPILIT JAGA DESA AWARD 2025

PENGHARGAAN BIDANG KAWASAN NASIONAL

AKSI NASIONAL KAWASAN NASIONAL

PENGHARGAAN BIDANG KAWASAN NASIONAL

AKSI NASIONAL KAWASAN NASIONAL

PENGHARGAAN BIDANG KAWASAN NASIONAL

AKSI NASIONAL KAWASAN NASIONAL

PENGHARGAAN BIDANG KAWASAN NASIONAL

AKSI NASIONAL KAWASAN NASIONAL



PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

PRARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DICARIKAN SOLUSI

Plt Kadispendikbud Sidoarjo Raih Penghargaan Kualitas Pelayanan Tertinggi

Sinergi Positif Pemerintah dan Satuan Pendidikan

Sidoarjo, Memorandum
Sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas atau pejabat yang baru menjabat kerap mencatat prestasi dan menerima penghargaan berkat program kerja cepat dalam hal melayani masyarakat.

Geger Mayat Terapung di Sungai Ponokawan

Sidoarjo, Memorandum
Warga Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengemping di aliran sungai, Rabu (29/7), pagi. Jasad pria itu pertama kali terlihat mengemping di tepi sungai dengan mengenakan kaos hijau dan celana hitam.

Seperti Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd., yang meraih Penghargaan Kualitas Pelayanan Tertinggi berdasarkan Opini Ombudsman RI dalam Penilaian Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 dengan perolehan nilai 92,13.

Plt Kadispendikbud Sidoarjo, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd. membenarkan hal itu. Pihaknya menyampaikan, penghargaan yang diterima itu merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras bersama, dedikasi dalam memajukan kualitas pendidikan, serta sinergi positif antara pemerintah dan satuan pendidikan.

"Keberhasilan diraih berkat dukungan berbagai pihak di lingkungan dinas dan satuan pendidikan, dan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhasil meraih nilai tertinggi dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Di antaranya, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 92,45, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 92,13, serta RSUD R. T. Notopuro Sidoarjo yang memperoleh nilai 89,01. Capaian tersebut

menempatkan ketiganya sebagai perangkat daerah dengan kualitas pelayanan terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan penghargaan

PEMKAB SIDOARJO

Raih Prestasi Kinerja Tertinggi Nasional, Percepat Pembangunan Infrastruktur untuk Dorong Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali meraih prestasi di tingkat nasional setelah meraih Penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi se-Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PENGHARGAAN tersebut diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPD) Tahun 2025 dengan skor 3.6389 dan status kinerja tinggi. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Jakarta.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta percepatan pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi motivasi untuk terus me-



TERBAIK: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi se-Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



LONGKUNGAN: Penandatanganan perjanjian kerja sama penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Pemprov Jatim.



ingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Borkol



PEDULI: Bupati Sidoarjo Subandi saat bertemu warga untuk memberikan bantuan sosial.

kerja keras seluruh jajaran. Kabupaten Sidoarjo memperoleh Penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi se-Indonesia. Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah," ujar Subandi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Justu, pemerintah daerah harus semakin inovatif dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

"Pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas birokrasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung

oleh masyarakat" ujarnya.

Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemkab Sidoarjo juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Infrastruktur vital menjadi fondasi penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi kemacetan, mengondisikan banjir, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu proyek strategis yang sedang dipelemparkan adalah pembangunan Flyover Gedangan. Proyek tersebut ditujukan untuk mengurai kemacetan di kawasan Simpang Gedangan yang selama ini menjadi salah satu titik padat lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo.

Saat ini proses pembebasan lahan masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir 2026, sedangkan pembangunan fisik direncanakan dimulai pada 2027.

Bupati Subandi mengungkapkan, bahwa proyek Flyover Gedangan merupakan program prioritas karena akan memberikan manfaat besar bagi mobilitas masyarakat dengan distribusi barang dan jasa.

"Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung percepatan pembebasan lahan sehingga proyek dapat segera memasuki tahap konstruksi," terangnya. (vgo)



Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan dalam ADIPEDHAS Jaga Desa Award 2026.



INOVASI: Bupati Sidoarjo Subandi menetapkan kebijakan fleksibilitas lokasi kerja yang mengoptimalkan tugas di kantor dan tugas di rumah.

Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Plt Kadispendikbud Sidoarjo Raih Penghargaan Kualitas Pelayanan Tertinggi

Sinergi Positif Pemerintah dan Satuan Pendidikan

Sidoarjo, Memorandum

Sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas atau pejabat yang baru menjabat kerap mencatatkan prestasi dan menerima penghargaan berkat program kerja cepat dalam hal melayani masyarakat.

Geger Mayat Terapung di Sungai Ponokawan

Sidoarjo, Memorandum

Warga Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengapung di aliran sungai, Rabu (29/7), pagi. Jasad pria itu pertama kali terlihat mengapung di tepi sungai dengan mengenakan kaos hijau dan celana hitam.

bersama tim ambulans segera melakukan proses evakuasi terhadap jasad korban. Garis polisi juga dipasang untuk memudahkan proses identifikasi dan penyelidikan.

Abu Yazid, Kades Ponokawan membenarkan kejadian ini. Ia menyebut, korban bernama Moh Kholil (59), alamat RT 8 RW

Seperti Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd, yang meraih Penghargaan Kualitas Pelayanan Tertinggi berdasarkan Opini Ombudsman RI dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 dengan perolehan nilai 92,13.

Plt Kadispendikbud Sidoarjo, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd membenarkan hal itu. Pihaknya menyampaikan, penghargaan yang diterima itu merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras bersama, dedikasi dalam memajukan kualitas pendidikan, serta sinergi positif antara pemerintah dan satuan pendidikan.

"Keberhasilan diraih berkat dukungan berbagai pihak di lingkungan dinas dan satuan pendidikan, dan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhasil meraih nilai tertinggi dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Di antaranya, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 92,45, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 92,13, serta RSUD Il. T. Notopuro Sidoarjo yang memperoleh nilai 89,01. Capaian tersebut



Bupati Sidoarjo H Subandi menyerahkan penghargaan kepada Plt Kadispendikbud Sidoarjo, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd.

menempatkan ketiganya sebagai perangkat daerah dengan kualitas pelayanan terbaik di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan penghargaan

dilakukan di ruang kerja Bupati Sidoarjo, Kamis (16/7), sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sidoarjo, H Subandi berharap prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi OPD penerima penghargaan, tetapi juga menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah lainnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta bebas dari praktik maladministrasi demi meningkatkan kepercayaan masyarakat. (hum/jok/ldn)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DPRD Sidoarjo Perkuat Peran sebagai Penyalur Aspirasi, KELUHAN WARGA JADI PRIORITAS UNTUK DIGARIKAN SOLUSI



SINGKEMAT: Dari kiri Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Suyarno, Wakil Ketua DPRD Warit Andono dan Wakil Ketua DPRD Kayan saat rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui berbagai agenda reses, kunjungan lapangan, hingga forum dialog dengan masyarakat, para wakil rakyat berkomitmen menyuarakan setiap aspirasi dan keluhan warga untuk kemudian diperjuangkan menjadi kebijakan maupun program pembangunan yang tepat sasaran.

BERBAGAI persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, banjir, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja, hingga pelayanan publik menjadi perhatian serius DPRD Sidoarjo. Seluruh aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas catatan, melainkan dibahas bersama pemerintah daerah agar dapat dicarikan solusi terbaik sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, fungsi utama DPRD tidak hanya membentuk peraturan daerah dan menyusun anggaran, tetapi juga memastikan suara masyarakat benar-benar menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.

Menurutnya, seluruh anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi warga, sekaligus mengawal penyelesaiannya bersama pemerintah daerah.

"Setiap aspirasi masyarakat yang



Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih saat kegiatan di Pendapa Delta Wibawa.

kami terima merupakan amanah yang harus diperjuangkan. DPRD hadir bukan hanya saat masa reses, tetapi juga terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar berbagai persoalan yang dihadapi dapat segera dicarikan solusi bersama pemerintah daerah," ujar Abdillah Nasih.

la menegaskan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap masuk dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan program pembangunan maupun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



"Kami ingin pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, aspirasi yang masuk akan kami kawal hingga menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga Sidoarjo," tegasnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Ia menilai setiap usulan masyarakat memiliki nilai penting karena berasal dari pengalaman dan kebutuhan nyata di lingkungan masing-masing.

"DPRD merupakan rumah aspirasi

masyarakat. Semua masukan yang disampaikan akan kami dengarkan, kami pelajari, kemudian kami perjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku. Tujuan akhirnya tentu bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan yang dibangun," ujar Suyarno.

Menurutnya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, DPRD akan terus mengawal setiap usulan agar menjadi prioritas sesuai skala kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

"Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa setiap aspirasi yang masuk tidak pernah diabaikan. Seluruhnya akan dibahas bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan menegaskan pentingnya membangun kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Menurutnya, pembangunan akan berjalan lebih optimal apabila seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik lahir dari komunikasi yang baik. Karena itu DPRD terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus menjaga komunikasi yang intens dengan masyarakat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama," katanya.

Ia menambahkan, berbagai keluhan masyarakat, baik mengenai fasilitas umum, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi, akan menjadi perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penganggaran.

"Kami tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengawal pelaksanaannya. Harapannya, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran DPRD sebagai mitra yang memperjuangkan kepentingan mereka," ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD



Wakil Ketua DPRD Kayan

Sidoarjo Warit Andono mengatakan, komunikasi yang baik antara masyarakat dan DPRD menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi karena DPRD memiliki fungsi sebagai penyalur sekaligus pengawal aspirasi rakyat.

"Kami selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat. Berbagai keluhan yang disampaikan, baik mengenai infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan maupun persoalan sosial lainnya, akan kami tangkap dan koordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera mendapat tindak lanjut," katanya.

Warit menambahkan, DPRD tidak hanya menerima laporan di ruang rapat, tetapi juga aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.

"Ketika kami melihat langsung kondisi di lapangan, tentu kami bisa memahami kebutuhan masyarakat secara lebih utuh. Dari situ kami bersama pemerintah daerah dapat mencari langkah penyelesaian yang paling efektif," ujarnya.

Komitmen DPRD Sidoarjo dalam menyerap aspirasi masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai forum komunikasi yang rutin digelar di setiap daerah pemilihan. Selain menjadi wadah penyampaian keluhan, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program pembangunan serta berbagai kebijakan pemerintah daerah. (vga)



Wakil Ketua DPRD Warit Andono (kiri) saat bertemu warga.



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno saat hearing.

Ansor dan Banser Sisir Toko Miras di Sidoarjo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Sidoarjo mulai bergerak menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjual minuman keras (miras) di wilayah kota Delta. Aksi tersebut diawali dengan mendatangi sebuah outlet penjualan miras di kawasan ruko Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Selasa 28 Juli 2026 malam.

Aksi yang diikuti puluhan anggota Ansor dan Banser itu merupakan bentuk respons atas semakin maralnya tempat penjualan miras, serta dugaan praktik prostitusi yang disebut telah menjamur di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Mereka menegaskan kegiatan serupa akan terus dilakukan selama sepekan ke depan.

Ketua GP Ansor Kabupaten Sido-



Ansor dan Banser turun menyisir toko miras yang kini menjamur di Sidoarjo.

arjo, Choirul Mu'minin, memimpin langsung penyisiran tersebut. Menurutnya, langkah ini dilakukan karena pihaknya menilai penindakan terhadap peredaran

miras dan praktik prostitusi belum berjalan maksimal.

"Sudah sekian lama keberadaan tempat penjualan miras dan tempat prostitusi ini ada, tetapi belum

ada gerakan secara masif dari Sarpol PP maupun aparat terkait. Karena itu, GP Ansor dan Banser turun langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial di Sidoarjo," ujar Choirul.

Ia menilai keberadaan tempat penjualan miras dan praktik prostitusi membawa dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran HIV yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama.

Selama sepekan ke depan, GP Ansor dan Banser berencana mendatangi sejumlah lokasi lain yang diduga menjadi tempat penjualan miras, praktik prostitusi, hingga tempat hiburan malam yang dianggap berpotensi melanggar ketentuan. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LAPAS KELAS I SURABAYA

Dukung Program Presiden, Lahan Tidur Disulap Jadi Lumbung Pangan, Kalapas Sohibur Rachman: Warga Binaan Siap Mandiri

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, sukses mengubah wajahnya. Tidak lagi sekadar tempat menjalani masa hukuman, lapas dengan luas total 14 hektare ini kini bertransformasi menjadi pusat agrobisnis produktif yang menyokong penuh program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

SIDOARJO—Melalui eksekusi prasi atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipras) Agus Andrianto, Lapas Porong berhasil mengoptimalkan lahan-lahan tidur yang selama ini tak tersentuh menjadi area pertanian, peternakan, hingga perikanan yang bernilai tinggi sejak tahun 2025 lalu.

Kepala Lapas (Kalapas)



BAHAGIA: Kalapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman saat menunjukkan hasil panen terong di lahan Lapas Kelas I Surabaya.

Kelas I Surabaya, Sohibur Rachman, A.Md.I.P., S.Sos., M.H., mengungkapkan bahwa gerakan ini didasari oleh 15 program akselerasi kementerian untuk mendorong kemandirian pangan di lingkungan pemasyarakatan.

"Berangkat dari konsep pembinaan kemandirian yang sudah running, kami di sini melakukan penguatan besar-besaran.

Kami mencoba mengajak warga binaan untuk aktif dan mengambil peran nyata. Salah satu gerakan awal adalah mengolah lahan tidur seluas 5.860 meter persegi yang selama ini tidak tersentuh," ujar Sohibur Rachman saat diwawancarai Radar Sidoarjo.

Dari Jagung Manis, Pisang Cavendish, hingga Suplai Makan Bergizi Gratis

Hasil kerja keras tersebut bukan isapan jempol. Dari lahan setengah hektare tersebut, Lapas Porong sukses melakukan panen perdana jagung manis sebanyak 2,5 ton hanya dari dua kilogram bibit.

Penan ben raya ini bahkan dihadiri dan mendapat apresiasi langsung dari Ketua Komisi XIII DPR RI,

Willy Aditya, serta didukung penuh oleh aparat penegak hukum dari TNI dan Polri yang ikut mengawal prosesnya.

Selain jagung, lapas ini juga memanfaatkan setiap jengkal spot kosong di area dalam, depan, hingga keliling lapangan tenis dan depan kediaman Kalapas untuk ditanami terong, cabai, singkong, kangkung, sawi, tomat, hingga pisang muli, kepok, dan pisang cavendish (moro-sebo).

Ada pula buah-buahan premium seperti pepaya California yang kini berjumlah sekitar 1.000 bibit, serta delapan jenis anggur termasuk varietas Jupiter yang diproyeksikan panen besar pada Agustus mendatang.

Menariknya, Lapas Porong juga tengah mengembangkan ubi madu varietas oranye dan ungu yang bi-



SUBUR: Kalapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman (dua dari kanan) saat melakukan penanaman pohon kelapa serentak bersama aparat keamanan dalam rangka HUT Republik Indonesia (RI) ke 80 tahun 2025.



ASTA CITA PRESIDEN: Kalapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman (tiga dari kanan) bersama Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya (empat dari kanan) dan Kakanwil Ditjenpas Jatim Kadiyono (lima dari kanan) saat panen jagung raya sebanyak 2,5 ton di eks lahan tidur Lapas Kelas I Surabaya.

litynya diambil langsung dari hasil penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Di sektor perikanan dan peternakan, lapas ini membudidayakan lele (baik di kolam konvensional maupun sistem bioflok), nila, gurami, patin, serta unggas seperti ayam kampung dan mentok.

Hebatnya, komoditas lele hasil budidaya warga binaan bahkan telah terserap oleh pasar eksternal untuk menyokong program pemerintah.

"Yang kemarin diambil itu lele, diambil untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Wonoayu. Sudah tiga kali diambil sebulan yang lalu. Lele kita tumbuh kembangnya sangat bagus, dagingnya banyak, tidak licin seperti di pasar, dan rasanya enak," ungkap mantan Karutan Cilodong Depok tersebut dengan bangga.

Terkait hasil panen, Sohibur menjelaskan bahwa orientasi utama program ini bukanlah komersial semata, melainkan proses edukasi.

Untuk komoditas terong, hasilnya sempat ditawarkan kepada pengunjung lapas dengan harga ekonomis dan laku keras.

"Kalau jagung panen pertama kemarin, niatnya kita memang berbagi. Kami bagi ke masyarakat sekitar lapas, dan selebihnya didistribusikan sebagai buah tangan untuk 161 anggota/pelugas kami untuk dibawa pulang. Nah, untuk panen ke-

dua yang kira-kira dua bulan lagi, rencananya akan kita jual agar hasilnya bisa berputar untuk beli bibit dan pupuk lagi," tambahnya.

Sementara untuk hasil peternakan seperti telur mentok, Kalapas memilih membagikannya secara gratis kepada tamu yang berkunjung.

Strategi Wali Blok dan Benteng Pertahanan Narkoba Untuk memastikan program ini berjalan beriringan dengan aspek kedisiplinan dan kebersihan, Kalapas membentuk tim khusus bernama Wali Blok melalui Surat Keputusan (SK) resmi.

Tim yang berisi staf gabungan dan anggota jaga ini bertugas melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi harian di blok hunian.

"Harapannya, kalau bloknya rapi, bersih, dan klan-kinnya diberdayakan dengan tanaman ketahanan pangan, warga binaan akan merasa sehat, nyaman, dan memiliki ruang huniannya. Tugas pemasyarakatan itu kompleks, bukan cuma mengamankan, tapi membina dan mengayomi," jelas mantan Kalapas Gunung Sugih ini.

Di sisi lain, Sohibur juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan lapas dari ancaman eksternal, termasuk penyelundupan narkoba yang sempat digagalkan dua kali dalam sebulan terakhir. "Barang sedikit saja kita laporkan, apalagi banyak. Semangat kita jelas, kita perang dengan narkoba, tidak main-main," tegasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Banser dan Ansor Sisir Toko Miras di Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Sidoarjo mulai bergerak menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjual minuman keras (miras) di wilayah kota Delta. Aksi tersebut diawali dengan mendatangi sebuah outlet penjualan miras di kawasan ruko Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Selasa (28/7).

Aksi yang diikuti puluhan anggota Ansor dan Banser itu merupakan bentuk respons atas semakin maraknya tempat penjualan miras, serta dugaan praktik prostitusi yang disebut telah menjamur di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Mereka menegaskan kegiatan

serupa akan terus dilakukan selama sepekan ke depan.

Ketua GP Ansor Kabupaten Sidoarjo, Choirul Mu'minin, memimpin penyisiran itu. Menurutnya, langkah ini dilakukan karena pihaknya menilai penindakan terhadap peredaran miras dan praktik prostitusi belum berjalan maksimal.

"Sudah sekian lama keberadaan tempat penjualan miras dan tempat prostitusi ini ada, tetapi belum ada gerakan secara masif dari Satpol PP maupun aparat terkait. Karena itu, GP Ansor dan Banser turun langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial di Sidoarjo," ujar Choirul.

Ia menilai keberadaan tem-

pat penjualan miras dan praktik prostitusi membawa dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran HIV yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama.

Selama sepekan ke depan, GP Ansor dan Banser berencana mendatangi sejumlah lokasi lain yang diduga menjadi tempat penjualan miras, praktik prostitusi, hingga tempat hiburan malam yang dianggap berpotensi melanggar ketentuan.

"Kami akan terus bergerak mendatangi tempat-tempat yang menjadi perhatian masyarakat. Harapannya ada tindakan



Ansor dan Banser turun menyisir toko miras di kawasan Sarirogo.

nyata dari pihak berwenang agar kondisi ini tidak semakin meluas," katanya.

Choirul menambahkan, gerakan tersebut juga mendapat dukungan moral dari para

ulama dan kiai di Sidoarjo yang sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya peredaran miras dan praktik prostitusi melalui berbagai kesempatan. (sud/jok/fdn)

CC BY-SA

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Indeks Perlindungan Anak Terbaik di Jatim

✓ Gresik, Sidoarjo, dan Kota Kediri Kuasai Tiga Besar

Beragam permainan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Surabaya.



Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengapresiasi komitmen sejumlah pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tiga daerah masing-masing Gresik, Sidoarjo, dan Kediri menjadi top ranking dalam perolehan Indeks Perlindungan Anak (IPA) terbaik se-Jatim pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026.

KETIGA daerah pun diganjar penghargaan yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Puncak Peringatan Hari

✦ Bersambung ke Hal. 11



Redaksi/Pemasaran/Iklan Jalan Cinta Menanggal I/35 Surabaya | Telepon (031) 8270967, 8271667

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

● Gresik...

Sambungan dari halaman 1

Anak Nasional Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan, Selasa (28/7/2026) kemarin.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak kembali mendapat pengakuan. Kabupaten Gresik berhasil meraih peringkat pertama Indeks Perlindungan Anak (IPA) tingkat Jawa Timur dan menempati posisi tiga besar secara nasional.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Gresik untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak. "Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus berjuang memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Gresik. Ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam membangun lingkungan yang ramah anak sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, hidup sehat, terlindungi, serta berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Penghargaan juga diraih Pemkab Sidoarjo yang dinobatkan sebagai daerah dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Terbaik II se-Jawa Timur.

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana yang hadir

mewakili Bupati, Subandi mengatakan, penghargaan ini, menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh. Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana mengatakan anak-anak adalah aset terpenting bangsa yang harus dilindungi dari berbagai ancaman, baik fisik maupun digital.

"Anak-anak adalah tunas masa depan bangsa. Tantangan hari ini cukup besar, mulai dari kekerasan fisik hingga kejahatan digital seperti cyberbullying dan eksploitasi di dunia maya. Tugas kita bersama membimbing mereka agar menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis dan tetap aman," ujar Wabup Mimik Idayana.

Sementara peringkat ketiga diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Penghargaan ini menjadi kadoterbaik bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-1147 Kota Kediri.

Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati yang biasa disapa Mbak Wali mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang semakin ramah anak.

"Alhamdulillah, penghargaan ini bukan hanya milik Pemerintah Kota Kediri, tetapi merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga keluarga yang terus berupaya memenuhi hak-hak dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak," ujarnya dalam keterangan dikutip, Rabu (29/7/2026).

Mbak Wali menerangkan, peng-

hargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Kediri untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

"Penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada anak. Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi agar setiap anak di Kota Kediri dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Karena anak-anak hari ini adalah generasi yang akan menentukan masa depan Kota Kediri dan Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam momentum HAN tersebut adalah Perisai Anak atau Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak sekaligus menekan potensi kekerasan dan dampak negatif yang dapat muncul dari aktivitas digital.

"Pemprov Jatim benar-benar memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, bukti nyata telah memberikan layanan seperti Perisai Anak yang akan melindungi perempuan dan anak di Jawa Timur," kata Arifah. **(Idisidhan)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Desa Bringinbendo, H. Soleh Dwi Cahyono

Dari Uang Pribadi, Peninggian Jalan hingga Kemandirian Sampah, Revolusi Senyap Desa Bringinbendo Taman

SIDOARJO-Memimpin sebuah desa semi-perkotaan dengan warisan masalah yang menumpuk bukanlah perkara mudah. Namun, bagi H. Soleh Dwi Cahyono, Kepala Desa (Kades) Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pengabdian adalah tentang menyerahkan segalanya, bahkan jika harus merogoh kocek pribadi dan "dana dapur" demi kesejahteraan warga.

Sejak dilantik pada tahun 2021 hingga kini di tahun 2026, wajah Desa Bringinbendo berubah total. Mulai dari beton jalan yang kokoh, penuntasan utang pajak puluhan tahun, hingga pengelolaan sampah mandiri yang sukses membebaskan desa dari ketergantungan pada TPA Jabon.

MEMBUKA AKSES TERISOLASI: JALAN PAVING TPS3R HINGGA JALAN TEMBUS BARU

Salah satu terobosan infrastruktur yang paling dirasakan manfaatnya oleh warga adalah pembangunan jalan usaha tani menuju TPS3R. Dulunya, jalur ini ha-

nyalah jalan sawah berbatu (makadam) dan tanah liat yang sempit, bahkan hanya bisa dilalui oleh sepeda atau sepeda motor. Di bawah kepemimpinan Abah Soleh, jalan tersebut diperlebar, dipadatkan, dan dipaving secara bertahap.

"Dulu akses jalan ke TPS3R itu jalan makadam, jalan sawah, belum bisa dilewati mobil. Tapi saya berpikir bagaimana jalan desa dan jalan sawah itu bisa diperlebar sehingga bisa diakses untuk mobil pembawa sampah," jelas Kades Bringinbendo yang akrab disapa Abah Soleh ini.

Tak sekadar menjadi akses operasional truk sampah, jalan paving ini kini memiliki fungsi ganda yang sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas publik.

"Manfaatnya banyak untuk jalan itu, yaitu dari jalan usaha tani, baik untuk tani sendiri, untuk kegiatan TPS, dan masyarakat. Bahkan jalan yang ada di sana itu bisa menghubungkan lintas desa. Malah banyak yang menggunakan



SINERGI: Kades Bringinbendo H. Soleh Dwi Cahyono (empat dari kanan) foto bersama dengan perwakilan PT Charoen Pokphand Indonesia didampingi Kapolsek Taman Kompol Kanisius Franata (tiga dari kanan) saat penyerahan bantuan CSR dari PT Charoen Pokphand Indonesia kepada warga Bringinbendo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

jalan itu sebagai akses lalu lalang," tutur pria 55 tahun ini.

Selain membenahi jalan akses TPS3R, Abah Soleh juga fokus membuka jalan-jalan tembusan baru di area yang dulunya terisolasi, berupa rawa-rawa atau semak belukar yang tidak terjangkau.

"Kita juga sudah membuat jalan-jalan tembus, seperti di Bringin Wetan itu jalan yang sudah kita buka dan sudah bisa dilewati ada dua titik, di Dusun Bendo ada sekitar tiga titik. Awalnya tidak ada jalan sama sekali, sekarang sudah ada jalan yang bisa dilewati oleh masyarakat agar akses mereka lancar, termasuk untuk menyokong sektor pertanian agar lebih enak," tambah pria kelahiran 24 November 1970 tersebut.

MODAL "UANG DAPUR" DAN PENGABDIAN LILLAH T'ALA

Langkah berani langsung diambil oleh pria asal Kediri ini bahkan sebelum dirinya resmi dilantik pada tahun 2021. Jalan di depan balai desa yang dulunya rusak dan kurang nyaman dilalui pengguna jalan, kini telah mulus berkat aksi cepatnya.

"Sebelum saya dilantik, saya menggunakan uang pribadi untuk akses ke balai desa disesuaikan atau dibagikan dengan cara dicor. Kurang lebih hampir dua kilometer kita belonisasi dengan dana pribadi dan swadaya

masyarakat," kenang Abah Soleh.

Tak hanya itu, Abah Soleh juga berkomitmen untuk melunasi tunggakan pajak Tanah Kas Desa (TKD) sejak tahun 1995.

"Saya berkomitmen melunasi pajak TKD yang nunggak sejak tahun 1995, untuk nominalnya kurang lebih Rp 320 juta. Sudah bertahun-tahun, mendekati angka lunas sekarang. Pengabdian saya itu di Bringinbendo full lahir batin lillahi ta'ala," tegasnya.

Bendahara Desa Bringinbendo, Junjung Bagus Catur A., SH, mengaku kerap

merasa sungkan dengan kedermawanan sang kades yang kerap menambahi kekurangan anggaran proyek desa menggunakan uang pribadinya.

"Kepala desa kami itu kalau ada pembangunan biasanya anggarannya misalnya Rp 50 juta, nah uangnya itu kurang, sama beliau ditambahi sendiri. Ini yang bikin saya sebagai bendahara sungkan. Bahkan untuk normalisasi sungai, beliau menggunakan alat berat miliknya sendiri, menanggung sopir hingga solarnya," ungkap Junjung Bagus. (dik/vga)



PEMBINAAN: Ibu PKK Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, menerima penghargaan dari TP PKK Kabupaten Sidoarjo dengan kategori kader kesehatan dengan pengabdian 35 tahun.

Safety Riding Center MPM Honda Jatim

Sarana Edukasi Keselamatan Berkendara Berstandar Honda

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Keselamatan berkendara merupakan fondasi utama dalam menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib. Sejalan dengan semangat kampanye #Cari_Aman, PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) terus memperkuat edukasi keselamatan berkendara melalui Safety Riding Center yang berlokasi di MPM Learning Center, Sedati, Sidoarjo.

Hadir sebagai pusat edukasi keselamatan berkendara, Safety Riding Center MPM Honda Jatim terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas sepeda motor, perusahaan, hingga instansi pemerintah. Fasilitas ini menjadi wujud komitmen MPM Honda Jatim dalam membangun budaya berkendara yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui pembelajaran yang terstruktur, interaktif, serta berbasis praktik.

Mengusung konsep learning by doing, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai teori keselamatan berkendara, tetapi juga pengalaman praktik secara langsung di area



Kegiatan Safety Riding Center MPM Honda Jatim. Foto : Hms.

pelatihan yang dirancang menyerupai kondisi berkendara di jalan raya. Metode ini membantu peserta memahami teknik berkendara yang benar sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai potensi bahaya saat berkendara.

Safety Riding Center dilengkapi dengan ruang kelas edukasi yang nyaman, lintasan praktik, simulator berkendara, serta berbagai media pembelajaran yang mendukung proses pelatihan. Seluruh program dipandu oleh instruktur Safety Riding Honda bersertifikasi

dengan materi yang mengacu pada standar Astra Honda Motor.

Peserta dibekali berbagai materi, mulai dari teknik dasar berkendara, postur berkendara yang benar, teknik pengereman, keseimbangan, pengendalian sepeda motor, teknik menikung, hingga kemampuan mengenali potensi bahaya (hazard perception). Selain itu, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya penggunaan perlengkapan berkendara sesuai standar, seperti helm berstandar SNI, jaket, sarung tangan, serta etika berlalu lintas

sebagai bagian dari upaya menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman.

Selain meningkatkan keterampilan berkendara, setiap sesi pelatihan juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama pengguna jalan, disiplin dalam berlalu lintas, serta pentingnya menjadikan keselamatan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim, Suhari, mengatakan, keberadaan Safety Riding Center merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mendukung terciptanya budaya keselamatan berkendara di Indonesia.

"Keselamatan berkendara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengendarai sepeda motor, tetapi juga oleh pengetahuan, sikap, dan kepedulian terhadap pengguna jalan lainnya. Melalui Safety Riding Center, kami ingin menghadirkan sarana edukasi yang dapat dimanfaatkan berbagai kalangan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan berkendara sesuai semangat kampanye #Cari_Aman. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang menjadikan keselamatan sebagai bagian dari gaya hidup saat berkendara," ujar Suhari. (diy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SINERGI: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto (tengah) bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing (kiri) dalam ungkap kasus dugaan pelanggaran izin tinggal 15 WNA, di Sidoarjo.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Tegaskan **TAK ADA** Ruang bagi Pelanggar

Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Diperketat

SIDOARJO—Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian guna menjaga keamanan serta ketertiban wilayah. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan intensif terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA), operasi gabungan bersama instansi terkait, hingga penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan keimigrasian.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menciptakan sistem keimigrasian yang tertib, profesional, dan mampu memberikan kepastian hukum. Selain memastikan pelayanan keimigrasian berjalan optimal, pengawasan juga diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran administrasi, hingga aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme, baik pengawasan administrasi maupun pengawasan lapangan.

Menurutnya, keberadaan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Surabaya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Pengawasan keimigrasian merupakan salah satu tugas utama kami. Setiap warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya wajib mematuhi seluruh ketentuan keimigrasian. Apabila ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan tindakan secara tegas sesuai aturan yang berlaku," ujar Agus Winarto.

Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas imigrasi, tetapi juga melibatkan sinergi dengan berbagai instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai keberadaan maupun aktivitas orang asing dapat diperoleh secara cepat dan akurat. "Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan keimigrasian yang efektif dan mampu mencegah berbagai potensi pelanggaran sejak dini," katanya.



Agus Winarto

Kepala Kantor
Imigrasi Kelas I
Khusus TPI
Surabaya



PENINDAKAN KEIMIGRASIAN SELAMA 2026

Komitmen Tegas Menegakkan Hukum, Menjaga Kelestarian Negara

APRIL 2026



Penindakan dua WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal

JUNI 2026



Deportasi tiga WNA asal Tiongkok karena manipulasi data untuk visa

JUNI 2026



Deportasi delapan WNA asal Tiongkok karena melanggar ketentuan izin tinggal

JULI 2026



Bersama Polresta Sidoarjo mengamankan 15 WNA untuk kepentingan penyelidikan



UNGKAP: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto menunjukkan sejumlah barang bukti kasus dugaan pelanggaran izin tinggal 15 WNA, di Sidoarjo.

Selain pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya juga secara konsisten melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian. Bentuk pelanggaran yang ditindak antara lain penyalahgunaan izin tinggal, overstay, hingga aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Agus menegaskan, setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum, baik melalui tindakan administratif keimigrasian maupun proses hukum apabila memenuhi unsur pidana.

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran keimigrasian. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus menciptakan kepastian hukum," tegasnya. Ia menambahkan, langkah tegas tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk penindakan, tetapi juga menjadi upaya preventif agar seluruh warga negara asing maupun pihak yang menjadi penjamin memahami pentingnya mematuhi peraturan keimigrasian di Indonesia. (sur/vga)



TEGAS: Upaya penindakan dengan mendeportasi warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian.



TIDAK AKAN
Pengemudi
menghindari
aspal ambles
di Jalan Raya
Tropodo.
Lubang akan
bisa oleh
uraian agar
mudah
terlihat.

Bekas Galian Proyek Pipa Diduga Sebabkan Aspal Ambles di Tropodo

Lubang Bahayakan Pengendara

SIDOARJO – Kondisi Jalan Raya Tropodo, Kecamatan Waru, membahayakan pengguna jalan. Aspal di tengah ruas jalan tersebut ambles dengan diameter sekitar 1,5 meter dan kedalaman mencapai 10 sentimeter, sehingga berpotensi memicu kecelakaan, terutama pengendara roda dua.

Melihat kondisi tersebut, warga sekitar berinisiatif memasang penanda di sekitar lubang agar mudah terlihat oleh pengendara yang melintas. Salah seorang warga, Wi-



Kemungkinan bekas galian. Tanah di bawahnya masih basah, tetapi bagian atasnya sudah diaspal."

Achmad Farkhan Jazuli
Camat Waru

bisana mengatakan kerusakan jalan itu diduga merupakan bekas galian proyek yang kemudian ditutup kembali dengan lapisan aspal. "Sudah lebih dari sebulan. Kalau tidak salah bekas proyek galian pipa PDAM," ujarnya.

Menurutnya, kondisi jalan terus memburuk karena setiap hari dilintasi kendaraan bertonase besar. Akibat-

nya, permukaan aspal semakin ambles dan membentuk lubang yang cukup dalam. "Sudah banyak pengendara motor yang hampir terjatuh setelah melewati lubang," tambahnya.

Kerusakan Serupa di Empat Titik

Camat Waru Achmad Farkhan Jazuli mengungkapkan,

kerusakan serupa tidak hanya terjadi di Jalan Raya Tropodo. Sejumlah ruas jalan lain di wilayah Waru juga mengalami kerusakan yang diduga akibat bekas galian proyek yang belum dipulihkan secara maksimal.

"Kemungkinan bekas galian. Tanah di bawahnya masih basah, tetapi bagian atasnya sudah diaspal," jelasnya. Beberapa titik yang mengalami kondisi serupa di antaranya Jalan Brigjen Katamso, Jalan Raya Wadungasri, hingga kawasan Pondok Tjandra, Tambak Sawah.

Farkhan menambahkan,

status Jalan Raya Tropodo merupakan jalan nasional sehingga penanganan dan pemeliharannya menjadi kewenangan instansi terkait. Meski demikian, pihak kecamatan akan segera berkoordinasi agar kerusakan tersebut segera mendapat penanganan. "Kami akan menyampaikan laporan ini kepada dinas terkait," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo M. Makhmud memastikan pihaknya akan segera mengecek. "Siap. Nanti kami tindak lanjut," ujarnya singkat. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sepuluh Toko Miras Masih Aktif Berjualan

Bupati Beralasan Penertiban Masih Menunggu Hasil Sidak Wabup

SIDOARJO – Dari 16 toko minuman keras (miras) yang meresahkan dan diduga melanggar aturan, sebanyak 10 usaha masih terantau beroperasi dan aktif berjualan. Bahkan, beberapa toko masih gencar memasarkan produknya melalui media sosial.

Melihat kondisi tersebut, desakan mengemuka dalam silaturahmi Bupati Sidoarjo bersama jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo kemarin (29/7).

Ketua PCNU Sidoarjo Zainal Abidin menilai pemerintah harus segera bertin-



ASPIRASI PUBLIK: Banner berisi penolakan miras dan prostitusi terpasang di Jalan Sarirogo. Desakan penertiban terus menguat seiring bertambahnya banner dan spanduk.

dak karena peredaran miras semakin meresahkan dan mudah dijumpai hingga ke warung-warung.

"Pemerintah harus melakukan sweeping dan jangan sampai Ansor dan Banser yang turun. Pemerintah harus bergerak," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin. Dia meminta Pemkab bergerak lebih cepat apabila toko-toko tersebut terbuka

ti tidak mengantongi izin sesuai ketentuan. "Bupati sudah menyampaikan selama ini tidak pernah mengizinkan peredaran miras. Kalau memang tidak memiliki izin, seharusnya bisa langsung ditutup dan tidak perlu menunggu terlalulama," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sidoarjo Subandi beralasan masih menunggu hasil in-

speksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Hasil sidak tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah penertiban.

"Wakil Bupati sudah melakukan sidak. Setelah hasilnya kami terima, nanti akan kami berikan arahan dan keputusan terkait persoalan miras," kata Subandi. **(ful/hen)**

DISKOMINFO SIDOARJO

URAI KEMACETAN: Flyover Gedangan digagas untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian.



ANGGER BOHDAN/JAWA POS

Pembebasan Lahan Flyover Gedangan Dikebut

Pemkab Sidoarjo Targetkan Ramnino Tahun Ini



GERAK CEPAT: Bupati Sidoarjo Subandi meminta

Jawa Pos



kenn ikanto/bhirawa

MUI Gresik saat menggelar re upgrading dan Rakor pelugas bimbingan rohani

250 Orang Wredatama Sidoarjo, Kumpul Bersama Peringati HUT PWRI ke-64

Sidoarjo, Bhirawa

Ratusan para Wredatama di Kabupaten Sidoarjo, Rabu pagi (29/7) kemarin, kumpul silaturahmi, di pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, memperingati HUT PWRI Nasional ke -64 tahun 2026.

Ketua PWRI Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto, mengatakan ada sekitar 250 orang Wredatama di Kabupaten Sidoarjo, dari 18 kecamatan hadir dalam acara itu. Dirinya menyatakan bersyukur acara-acara yang digelar dalam menyambut peringatan PWRI tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. "Semoga kegiatan ini ada manfaatnya, sebagai silaturahmi para Wredatama di Sidoarjo, karena silaturahmi itu membuat sehat dan memperpanjang usia," kata mantan Wakil Bupati Sidoarjo itu.

Meski sudah purn tugas sebagai ASN, para anggota PWRI Sidoarjo tetap aktif melakukan kegiatan membantu Pemerintah dalam pembangunan. Pada HUT PWRI ke 64 tahun 2026, pengurus dan anggota PWRI Sidoarjo, telah melakukan kegiatan sosial memberi santunan kepada anak yatim piatu di panti asuhan, menyumbangkan Mushaf Al-Quran kepada masjid dan melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. "Kita sudah purna tugas, tetapi kita tetap membantu Pemerintah dengan kemampuan yang kita miliki," komentar Ketua PWRI Sidoarjo, dua kali periode tersebut.[kus.ca]



alikus/Bhirawa

Anggota PWRI Sidoarjo ceria dan gembira saat hadir dalam peringatan HUT PWRI Nasional ke-64 tahun 2026, di pendopo Delta Wibawa.

CS



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

URAI KEMACETAN:
Flyover Gedangan digagas untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Pembebasan Lahan Flyover Gedangan Dikebut

Pemkab Sidoarjo Targetkan Rampung Tahun Ini

SIDOARJO - Kemacetan di Simpang Empat Gedangan menjadi perhatian pemerintah pusat karena merupakan salah satu titik padat di jalur nasional Surabaya-Malang. Untuk mengurainya, Pemkab Sidoarjo terus mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan *flyover*.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, *flyover* Gedangan digagas untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Sekaligus mendukung aktivitas perekonomian. Jembatan layang tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 475 meter dan membutuhkan lahan seluas sekitar 45.822 meter persegi. "Kami menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat dituntaskan pada tahun ini," katanya.

Hingga pertengahan Juli, sebanyak 106 dari total 122 bidang tanah yang dibutuhkan telah dinyatakan tuntas. Sementara itu,



DISKOMINFO SIDOARJO

16 bidang lainnya masih menjalani penyelesaian administrasi sebelum memasuki tahapan penilaian harga oleh tim appraisal. Proses tersebut dilakukan agar pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan.

Subandi menjelaskan, seluruh tahapan administrasi kini dikerjakan secara bersamaan agar penyelesaian pembebasan lahan tidak memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, percepatan tersebut menjadi kunci agar pembangunan fisik *flyover* dapat segera dimulai sesuai jadwal.

"Kami bergerak cepat, pengumpulan dokumen lahan hingga

pengukuran terus berjalan secara paralel, kami menargetkan proses *appraisal* sudah bisa dimulai pada Agustus nanti," ujarnya.

Untuk mendukung percepatan tersebut, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400 miliar. Sebanyak Rp 200 miliar dialokasikan melalui APBD 2026, sedangkan Rp 200 miliar lainnya disiapkan pada APBD 2027. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembayaran ganti rugi lahan kepada warga terdampak.

Subandi juga membentuk tim pengadaan tanah yang berkoordinasi dengan BPN, tim penilai independen, dan konsultan hukum. **(ful/xav)**

GERAK CEPAT:
Bupati Sidoarjo Subandi memimpin rapat koordinasi mengenai proyek pembangunan flyover Gedangan bersama DPUBMSDA, BBPJJN, Kecamatan Gedangan, dan Kejari.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Jadi Daerah Dengan Indeks Perlindungan Anak Terbaik di Jatim.



Sidoarjo, centralberitanews.com – Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai daerah dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) terbaik II di Jawa Timur. Penghargaan itu diumumkan pada peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur yang digelar di wisata alam Pintu Langit Pasuruan, Selasa,(28/7/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Pada peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama ekosistem perlindungan anak diruang digital. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dan Kepala Kantor UNICEF Wilayah Jawa-Bali Tubagus Arie Rukmantara hadir menyaksikan penandatanganan komitmen bersama tersebut. Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana yang hadir mewakili Bupati H Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen memberikan perlindungan anak secara menyeluruh. Disampaikannya anak-anak adalah aset terpenting bangsa. Mereka merupakan tunas masa depan bangsa yang harus dilindungi secara menyeluruh. Oleh karenanya pemerintah harus menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. “Pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak dari berbagai ancaman, baik secara fisik maupun digital harus menjadi komitmen bersama,” ucapnya. Wabup Mimik Idayana mengatakan tantangan yang masih dihadapi anak-anak hari ini cukup besar. Mulai dari kekerasan, pelecehan hingga dampak negatif dari teknologi digital. Dikatakannya internet membuka peluang tindak kekerasan di dunia maya seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, konten negatif, hingga eksploitasi digital. Oleh karenanya anak-anak harus dibekali dengan literasi digital, nilai-nilai etika, serta kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. “Sudah menjadi tugas kita bersama untuk membimbing anak-anak agar menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, kreatif, dan tetap aman,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan Menteri PPPA, Arifah Fauzi. Ia mengatakan saat ini anak-anak tidak hanya hidup diruang fisik, namun mereka saat ini juga hidup didunia digital. Oleh karenanya penggunaan media sosial menjadi tantangan anak saat ini. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Bahkan kejahatan didunia maya menjadi salah satu ancaman mereka. “Di ruang fisik anak-anak butuh keluarga yang hangat, komunikatif dan menyejukkan. Sedangkan di ruang digital anak-anak perlu mendapatkan ruang yang aman,” ujarnya. Arifah Fauzi mengatakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tidak bias diselesaikan satu sektor saja. Butuh keterlibatan semua pihak. Provinsi Jawa Timur menjadi contoh bagaimana pemenuhan hak anak dan perlindungan anak bisa diselesaikan bersama. Salah satunya lewat program Perisai Anak yang diluncurkan Pemprov Jatim. “Saat kita memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak kita lakukan, sesungguhnya kita sedang menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” ujarnya. Git.

(@.prm).





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Komitmen Tekan Stunting Berbuah Prestasi, Bupati Subandi dan Ketua TP PKK Sidoarjo Raih Penghargaan Nasional



SIDOARJO | MEDIASOROTMATA.COM – Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua TP PKK Sidoarjo Sriatun Subandi menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atas komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting dan menguatkan ketahanan keluarga. Inovasi program unggulan yang dijalankan Pemkab Sidoarjo selama ini dinilai sejalan dengan upaya menyiapkan Generasi Emas 2045. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Shodiqin, kepada Bupati Sidoarjo H Subandi dan Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Sriatun Subandi. Penyerahan dilakukan pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (29/7/2026). Pemerintah pusat mengapresiasi Sidoarjo yang dinilai konsisten menjalankan sejumlah program prioritas nasional, seperti Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan, mewujudkan keluarga berkualitas membutuhkan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam pengasuhan. Untuk mendorong peran ayah, Pemkab Sidoarjo telah menerbitkan surat edaran Gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas). “Gerakan ini bertujuan menguatkan peran serta ayah dalam pengasuhan sekaligus mempererat ikatan emosional anak dalam mendampingi proses pendidikannya,” ujar Subandi. Selain keterlibatan orang tua, Pemkab Sidoarjo juga terus mempercepat penurunan stunting melalui penguatan posyandu dan perbaikan sanitasi lingkungan. Hasilnya, Sidoarjo dinyatakan memenuhi status Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar dari tim verifikator Provinsi Jatim. “Pelaksanaan STBM tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya. Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo Heni Kristiani menjelaskan implementasi teknis program-program nasional tersebut di wilayahnya. Untuk Program Tamasya, Pemkab Sidoarjo bermitra dengan sekitar 32 pengelola daycare (tempat penitipan anak) guna memastikan pengasuhan terstandarisasi dan menjamin rasa aman bagi anak. Sementara itu, untuk penanganan lansia melalui Program Sidaya, Pemkab Sidoarjo menjalankan Sekolah Lansia Tangguh (Selantang). “Selantang merupakan pendidikan nonformal agar warga lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kegiatan di dalamnya mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, senam kebugaran, hingga penyuluhan gizi seimbang,” kata Heni. (NURI)

